

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Seiring dengan kebangkitan ekonominya, Tiongkok dinilai juga semakin agresif berkronfrontasi dengan beberapa negara tetangga dan kawasan dalam pengklaiman wilayah. Salah satu konfrontasi agresif yang dilakukan oleh Tiongkok adalah pengklaiman wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Konfrontasi yang dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-negara pengklaim LTS dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi kelangsungan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Banyaknya negara yang terlibat konflik dan tidak adanya aturan yang mengikat menambah besar kemungkinan terjadinya eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata. Dengan tujuan mencegah terjadinya eskalasi konflik LTS, ASEAN sebagai organisasi kawasan yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara mencoba menjadi pihak penengah dalam penyelesaian konflik ini.

ASEAN berisikan 10 negara anggota salah satunya adalah Kamboja yang menjadi bagian dari anggota tetap ASEAN pada April 1999. Sebagai bagian dari ASEAN, tentunya Kamboja memiliki hak yang sama dan dapat bertindak secara aktif dalam upaya penyelesaian konflik LTS. Usaha pertama ASEAN diawali pada tahun 1992 dan menghasilkan *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Kemudian di tahun 2002 ASEAN dan Tiongkok berhasil menandatangani dokumen politik namun masih tidak mengikat secara hukum yang dikenal dengan

*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*. Keberhasilan ASEAN dan Tiongkok dalam penandatanganan DoC belum menjadi titik akhir penyelesaian konflik LTS, dikarenakan DoC hanyalah dokumen perjanjian politik yang tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum yang mengikat. Oleh karena itu maka ASEAN kembali bekerja keras untuk mewujudkan terbentuknya *Code of Conduct (CoC)* yang memiliki aturan hukum yang mengikat.

Sayangnya, ASEAN menemui kegagalan dikarenakan penolakan Kamboja dalam kesepakatan *joint communique* ASEAN, hal ini merupakan kali pertama selama 45 tahun sejarah pertemuan tingkat menteri, ASEAN gagal mencapai kesepakatan pada *joint communique*. Namun kegagalan tersebut tidak menjadi kegagalan pertama dan terakhir bagi ASEAN, karena pada tahun 2016 ASEAN kembali menemui jalan buntu dalam penyelesaian LTS. Penolakan Kamboja ini mengindikasikan perilaku *bandwagoning* Kamboja terhadap Tiongkok terkait Isu Konflik Laut Tiongkok Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait isu konflik Laut Tiongkok Selatan. Peneliti melihat Kamboja dari segi konsep *smallstate*, dan pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh *small state*. Definisi *small states* didasarkan kepada kapabilitas *power* sebuah negara, baik dari segi *absolute* maupun *relative*. Kamboja merupakan bagian dari negara kecil, bukan hanya dikarenakan besar ataupun kecilnya wilayah geografi, namun lebih kepada kapabilitas *power* Kamboja. Walt menyatakan bahwa perilaku kebijakan luar negeri *small state* akan lebih cenderung memilih untuk *bandwagoning* terhadap *great power* daripada

*balancing* menentang mereka. Terdapat tiga indikator untuk menentukan mengapa negara memilih untuk *bandwagoning*, yaitu *power and weakness*, *the availability of allies*, dan *the vulnerability of state*.

a) *Power and weakness*

Walt menyatakan bahwa perilaku kebijakan luar negeri *small state* cenderung untuk *bandwagoing* terhadap *great power*. Indikator pertama negara memilih untuk *bandwagoing* adalah lemahnya kapabilitas power negara tersebut dengan kata lain semakin lemah *power* sebuah negara maka semakin cenderung negara untuk *bandwagoning*. Berdasarkan data-data yang ada di Bab IV, menunjukkan bahwa Kamboja merupakan *small state* dengan kapabilitas *power* yang kecil. Maka, salah satu alasan penolakan Kamboja pada *joint communique* ASEAN terkait isu konflik Laut Tiongkok Selatan dikarenakan posisi Kamboja sebagai *small state* di kawasan Asia Tenggara dengan kapabilitas *power* yang kecil membuat Kamboja memilih untuk *bandwagoning* terhadap Tiongkok.

b) *The availability of allies*

Negara memilih untuk melakukan *bandwagoning* ketika mereka tidak menemukan sekutu yang sepadan dan potensial dengan tujuan yang sama dengan mereka. Melihat dari sisi sejarah dan geografis, di masa lalu Kamboja merupakan negara yang berada diantara dua negara tetangga yang kuat dan memiliki sejarah hubungan yang tidak cukup baik, yaitu Thailand dan Vietnam. Meledaknya konflik perebutan Candi Preah Vihear oleh Thailand dan Kamboja pada tahun 2008-2011, dan ASEAN yang dinilai kurang efektif dalam penyelesaian konflik memudarkan kepercayaan

Kamboja atas ASEAN yang mampu menjaga integritas Kamboja. Kemudian, tidak lama berselang setelah konflik antara Kamboja dan Thailand, Kamboja dihadapkan kembali pada konflik perbatasan dengan Vietnam. Potensi ancaman yang diterima oleh Kamboja dari dua negara tetangga yang kuat dan pudarnya kepercayaan terhadap kemampuan ASEAN dalam menjaga integritas keamanan dan kedaulatan Kamboja, menjadikan Tiongkok sebagai salah satu pilihan yang tersedia untuk Kamboja.

c) *The vulnerability of state*

Negara yang memiliki permasalahan dengan demokratisasi dan ketergantungan ekonomi akan memilih untuk melakukan *bandwagoning*. Ketika ketergantungan ekonomi terhadap hegemon yang tinggi, maka akan sulit bagi *small state* untuk *balancing* karena hal tersebut mahal dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kebijakan luar negeri memiliki hubungan dengan ketergantungan ekonomi *small state* dan hal ini juga memiliki implikasi terhadap hubungan politik dan ekonomi dalam negeri negara. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan erat dan tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh kebangkitan Tiongkok. Kamboja termasuk kepada negara dengan kapasitas ekonomi dan militer yang rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Selain itu, Kamboja juga merupakan negara penerima bantuan luar negeri yang cukup besar. Diantara semua donor bantuan luar negeri untuk Kamboja, Tiongkok merupakan negara pendonor terbesar di Kamboja. Dari data yang telah dituangkan sebelumnya di Bab IV terlihat bahwa Kamboja memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang



cukup tinggi dengan Tiongkok. Indikator ketiga ketika *small state* *bandwagoning* terhadap negara *great power* adalah dikarenakan tingginya tingkat interdependensi ekonomi terhadap *great power*. Semakin tinggi ketergantungan ekonomi terhadap negara *great power*, maka akan semakin sulit bagi *small state* untuk *balancing* karena hal tersebut mahal dan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Dari hasil analisis Kamboja sebagai *small states* berdasarkan tiga indikator tersebut maka alasan yang melatarbelakangi perilaku *bandwagoning* Kamboja terhadap Tiongkok terkait isu konflik Laut Tiongkok Selatan dapat disimpulkan karena perilaku kebijakan luar negeri *small state* dalam hal ini Kamboja cenderung untuk *bandwagoning* terhadap *great power*. Hal ini ditunjukkan dalam keberpihakan Kamboja terhadap Tiongkok dengan menolak setiap putusan yang dianggap akan merugikan Tiongkok dalam sengketa LTS.

## 5.2 Saran

Saran peneliti terkait isu yang diangkat adalah untuk jangka waktu yang lebih panjang di masa yang akan datang diharapkan Kamboja lebih berfokus untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara disekitar kawasan yang potensial untuk dijadikan aliansi. Tidak hanya itu, Kamboja juga diharapkan mampu memperkecil ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, dengan cara membuka diri dan peluang kerjasama dengan negara-negara *major power* lainnya di dunia maupun di kawasan Asia Tenggara.

Tingginya tingkat ketergantungan Kamboja terhadap Tiongkok dapat membatasi kebebasan Kamboja dalam menentukan arah kebijakan luar negeri sendiri. Ketika *small state* memilih untuk *bandwagoning* terhadap *great power*

tentunya banyak keuntungan yang didapat oleh *small states* untuk meningkatkan kapabilitas *power* negara sehingga mampu untuk bertahan di dalam sistem. Namun, semakin lama Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok maka akan semakin rentan kedaulatan Kamboja sebagai negara dan semakin lama Kamboja dapat kembali merdeka dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa dipengaruhi oleh Tiongkok.

Selanjutnya dari segi metodologi, bagi peneliti yang ingin untuk membahas lebih lanjut dan lebih mendalam mengapa Kamboja memilih untuk *bandwagoning* terhadap Tiongkok, peneliti menyarankan untuk menganalisis hal ini menggunakan perilaku kebijakan luar negeri *small state* berdasarkan pendekatan konstruktivis sosial, dan melihat dari sisi bagaimana peran ide dalam teori ilmu hubungan internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri yang diambil. Dalam hal ini konstruktivis berpendapat bahwa agen atau negara bertindak secara sosial dan material, sehingga pengaturan ini akan memberi pemahaman pada agen tentang kepentingan mereka. Sebagai hasilnya nanti, pemilihan kebijakan luar negeri *small states* akan ditentukan tidak hanya oleh lingkungan keamanan eksternal dan kepentingan material namun juga relevansi kebijakan luar negeri berdasarkan gagasan, ide serta identitas aktor dalam menafsirkan lingkungan eksternal dan kepentingan material mereka